

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2018 ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis yang dibebankan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2018.

LAKIP ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP sebagai salah satu alat penilai kinerja yang merupakan wujud transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, LAKIP juga bermanfaat bagi evaluasi internal sebagai umpan balik (*feedback*) dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi yang lebih komprehensif.

LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 serta perkembangan dalam upaya pencapaian atas sasaran strategis Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

Demikian LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kuala Tungkal, Maret 2019



**SEKRETARIS DAERAH
KAB. TANJUNGGABUNG BARAT**

Drs. H. AMBOK TUO, MM

Pembina Utama Madya

Nip. 19590527 198503 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit tentang capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam rencana kerja Tahun 2018.

Laporan ini berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang dikomparasikan dengan penetapan kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan berikut realisasinya.

Pada Tahun 2018, Dengan 18 Program, 108 Kegiatan dan 74 Indikator kinerja, maka dicapai rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan untuk Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 100 % dengan kategori *Baik*.

Hasil capaian kinerja tersebut, menunjukkan bahwa secara umum seluruh unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya.

Namun demikian perbaikan dalam perumusan indikator kinerja masih perlu dilaksanakan lebih lanjut, untuk lebih mengarah pada optimalisasi perwujudan peran dan fungsi Sekretariat Daerah dalam perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kebijakan daerah. Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan *self assesment* atas hasil kinerja yang telah dilaksanakan dan menjadi rujukan yang efektif menuju upaya perbaikan berkelanjutan oleh seluruh aparatur pelaksana untuk mewujudkan optimalisasi kinerja Sekretariat Daerah yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
D. Struktur Organisasi	15
E. Sistematika Penulisan	16

BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Strategis Tahun 2011-2016.....	17
1. Visi	18
2. Misi	19
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	20
C. Kebijakan Strategis	22
D. Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah	23
E. Penetapan kinerja Tahun 2018	30
F. Alokasi Anggaran Menurut Bagian dan Jenis Belanja Program	38

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018	42
B. Realisasi Anggaran Tahun 2018	53

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Langkah Kedepan	56

LAMPIRAN

Sk Lakip Ta 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018

Cascading Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Berdasarkan Golongan	15
Tabel 1.2 : Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 2.1 : Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Sekretariat Daerah	23
Tabel 2.2 : Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan Alokasi Anggaran	30
Tabel 2.3 : Alokasi Anggaran Menurut Bagian	38
Tabel 2.4 : Alokasi Belanja Program Setda Tanjab Barat tahun 2018	39
Tabel 3 : Capaian Kinerja Setda Tanjab Barat Tahun 2018....	43
Tabel 4 : Realisasi Anggaran Per-Bagian Setda Tanjab Barat Tahun 2018	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2018, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah (Setda) sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

LAKIP ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LAKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 ditetapkan dan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018, adalah :

1. Sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, tentang penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah selama Tahun 2017, dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang, maju, aman, adil dan merata berlandaskan iman dan taqwa.

Tujuan penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah ini adalah untuk :

1. Dapat digunakan sebagai media akuntabilitas Sekretariat Daerah yang menjadi acuan baku dan analisis lanjutan, mengarah pada sinergitas, sinkronisasi, dan integritas pelaksanaan program-kegiatan Sekretariat Daerah sesuai dengan acuan Renstra Sekretariat Daerah dengan arah kebijakan mewujudkan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. LAKIP Sekretariat Daerah ini juga berorientasi sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga Sekretariat Daerah dapat berperan dan berfungsi maksimal memfasilitasi, merumuskan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

C. Tugas dan Fungsi

1. Sekretaris Daerah

Dalam rangka perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan serta dalam menjalankan tugas dan peran kelembagaan perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi pada bagian pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan keagamaan, hukum, komunikasi dan dokumentasi serta mengkoordinasikan Sekretariat DPRD dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, serta keagamaan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

- (1) pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan keagamaan, hukum, serta komunikasi dan dokumentasi;
- (2) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- (3) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- (4) pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan keagamaan, hukum, serta komunikasi dan dokumentasi; dan
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya lingkup pemerintahan dan otonomi daerah meliputi: bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sekretariat DPRD, pemilihan umum, forkopimda, tugas pembantuan, pemberdayaan masyarakat desa, kecamatan, administrasi kewilayahan, pertanahan dan kerjasama.

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;

- (2) perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, otonomi daerah dan aparatur pemerintahan, serta administrasi kewilayahan dan kerjasama;
- (3) pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang tata pemerintahan, otonomi daerah dan aparatur pemerintahan, serta administrasi kewilayahan dan kerjasama;
- (4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, otonomi daerah dan aparatur pemerintahan, serta administrasi kewilayahan dan kerjasama; dan
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di kesejahteraan rakyat dan keagamaan meliputi: bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan keagamaan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
 - (2) perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, sosial, dan keagamaan;
 - (3) pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat, sosial, dan keagamaan;
 - (4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat, sosial, dan keagamaan;
 - (5) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian; dan
 - (6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
-

2.3 Bagian Hukum

Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan produk hukum daerah, dokumentasi dan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah.

Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
- (2) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perumusan produk hukum daerah, dokumentasi dan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah;
- (3) penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) pengumpulan bahan perumusan penyusunan produk hukum daerah;
- (5) fasilitasi penetapan produk hukum daerah;
- (6) penyusunan himpunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Daerah;
- (7) pengharmonisasian produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (8) pelaksanaan pendokumentasian dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah secara konvensional dan/atau elektronik;
- (9) pelaksanaan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- (10) pengkajian dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;
- (11) penyusunan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah (PROPEMPERDA);

- (12) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perumusan kebijakan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan sosialisasi produk hukum serta pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah;
- (13) pelaksanaan pelayanan administratif dan teknis pembinaan hak asasi manusia; dan
- (14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Bagian Komunikasi dan Dokumentasi

Bagian Komunikasi dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Komunikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya lingkup komunikasi dan dokumentasi meliputi: bidang komunikasi dan infomatika, statistik, perpustakaan, kearsipan dan komunikasi pimpinan.

Bagian Komunikasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
- (2) perumusan kebijakan di bidang komunikasi pimpinan, serta dokumentasi dan infomasi
- (3) pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang komunikasi pimpinan, serta dokumentasi dan infomasi;
- (4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi pimpinan, serta dokumentasi dan infomasi; dan
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi pada bagian sumber daya alam, perekonomian, dan administrasi pembangunan serta mengkoordinasikan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, kehutanan, pangan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, menengah, tenaga kerja, transmigrasi, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, perhubungan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengadaan barang dan jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

- (1) perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam, perekonomian, dan administrasi pembangunan;
- (2) pengoordinasian pelaksanaan program di bidang sumber daya alam, perekonomian, dan administrasi pembangunan;
- (3) pelayanan administrasi di bidang sumber daya alam, perekonomian, dan administrasi pembangunan;
- (4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program di bidang sumber daya alam, perekonomian, dan administrasi pembangunan; dan
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Bagian Sumber Daya Alam

Bagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya

lingkup sumber daya alam meliputi: bidang pertanian, kehutanan, pangan, lingkungan hidup, sumber daya air, serta energi dan sumber daya mineral.

Bagian Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
- (2) perumusan kebijakan di bidang pertanian dan kehutanan, ketahanan pangan, perikanan dan sumber daya air, serta lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral;
- (3) pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang pertanian dan kehutanan, ketahanan pangan, perikanan dan sumber daya air, serta lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral;
- (4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan kehutanan, ketahanan pangan, perikanan dan sumber daya air, serta lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral; dan
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya lingkup perekonomian meliputi: bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, menengah, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, dan transmigrasi.

Bagian Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
- (2) perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan BUMD, perindustrian dan perdagangan, serta koperasi, ukm dan keteangakerjaan;

- (3) pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang penanaman modal dan BUMD, perindustrian dan perdagangan, serta koperasi, ukm dan keteangakerjaan;
- (4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan BUMD, perindustrian dan perdagangan, serta koperasi, ukm dan keteangakerjaan; dan
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi di bidang administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.

Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
- (2) perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa;
- (3) pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa;
- (4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa; dan
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah terkait serta mengkoordinasikan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan penunjang bidang keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

- (1) pelaksanaan penyusunan kebijakan, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- (2) perumusan kebijakan di bidang organisasi dan tatalaksana, umum dan ketatausahaan, serta sarana dan prasarana;
- (3) pengoordinasian pelaksanaan program di bidang organisasi dan tatalaksana, umum dan ketatausahaan, serta sarana dan prasarana;
- (4) pelayanan administrasi di bidang organisasi dan tatalaksana, umum dan ketatausahaan, serta sarana dan prasarana;
- (5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program di bidang organisasi dan tatalaksana, umum dan ketatausahaan, serta sarana dan prasarana; dan
- (6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi serta penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang penataan kelembagaan dan kepegawaian, tata laksana dan pelayanan publik, serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
- (2) perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian, tata laksana dan pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
- (3) pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang kelembagaan dan kepegawaian, tata laksana dan pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
- (4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan kepegawaian, tata laksana dan pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan keuangan, rumah tangga pimpinan, serta keprotokolan.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
- (2) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan pimpinan dan setda;
- (3) pelaksanaan urusan rumah tangga pimpinan;
- (4) pelaksanaan keprotokolan;
- (5) pengelolaan arsip dan persuratan; dan
- (6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Bagian Sarana dan Prasarana

Bagian Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana lingkup Sekretariat Daerah.

Bagian Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
- (2) perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkup sekretariat daerah;
- (3) pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana lingkup sekretariat daerah;
- (4) penatausahaan sarana dan prasarana lingkup sekretariat daerah;
- (5) pengaturan pendistribusian dan penggunaan sarana dan prasarana lingkup sekretariat daerah;
- (6) pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkup sekretariat daerah;
- (7) pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana secara administrasi dan fisik;
- (8) penyusunan laporan aset sekretariat daerah; dan
- (9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. STAF AHLI

Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Staf Ahli mempunyai tugas :

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati terkait bidang ekonomi dan pembangunan;
- (2) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati terkait bidang hukum dan politik; dan
- (3) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati terkait bidang pemerintahan.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjab Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari sisi sumber daya aparatur di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada bulan Februari 2019 jumlah PNS tercatat sebanyak 121 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 82 orang dan perempuan 39 orang.

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Berdasarkan Golongan

Golongan IV					Golongan III				Golongan II				Golongan I				Total
A	B	C	D	E	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
6	8	3	1	-	24	18	13	9	-	4	26	6	-	-	2	1	121

Sumber : Bagian Organisasi 2019

Tabel 1.2
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S3	S2	S1	D1-D3	SLTA	SLTP	SD	TOTAL
-	7	57	11	42	2	2	121

Sumber : Bagian Organisasi 2019

Adanya hubungan komunikatif dan kekeluargaan yang erat antar pegawai di Sekretariat Daerah semakin memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini keterbatasan yang dimiliki oleh Pegawai yang satu dapat ditutupi dengan kelebihan (kemampuan) pegawai yang lain tanpa harus terikat secara struktural. Selanjutnya apabila ada kesulitan yang dihadapi oleh beberapa orang pegawai dalam pelaksanaan tugas, maka dilakukan kerjasama dengan yang lain untuk mengatasi kesulitan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018, LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2018 berupa Pengantar; Maksud dan Tujuan; Data Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; serta Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah; Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2018, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan pertujuan, analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja tahun 2017. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2018 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Strategis Tahun 2016-2021

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional, maupun global, menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk responsibilitas pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan desakan kearah penyelenggaraan pemerintahan lebih baik. Responsibilitas pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan, sehingga perubahan dapat terjadi secara terarah dan efektif mendorong terwujudnya visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berkualitas.

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu sentral dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah sebagai koordinator perangkat daerah, proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan daerah serta pembinaan administrasi dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

Selaku pengatur gerak penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah berperan penting dalam membangun dan mensinergiskan kesatuan arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan OPD menuju Visi utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

**Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju,
Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas.**

Semakin tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk respon positif, melalui pengaturan, pengendalian, dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat. Dengan proses yang teratur, terkendali, dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, yang pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

Fasilitasi, sinkronisasi OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menjadi salah satu tugas pokok dari Sekretariat Daerah. Hal ini kemudian menjadi faktor pendorong sekretariat daerah untuk menjadi lebih profesional, sehingga mampu menjadi sentral guidance bagi pelaksanaan urusan dan kewenangan OPD sesuai dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

1. Visi

Berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan, peluang, dan dinamika pemerintahan, serta dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Visi Sekretariat Daerah adalah :

“ Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif dan Berorientasi Pelayanan Publik ”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Sekretariat Daerah diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melakukan upaya peningkatan kualitas aparatur, sebagai motivator dan koordinator dalam perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan menghasilkan kebijakkan yang tepat dan akurat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan visi tersebut dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Penyelenggara Administrasi Pemerintahan memiliki maksud bahwa Sekretariat Daerah adalah merupakan institusi yang merumuskan, menyusun dan monev atas kebijakan pemerintahan daerah yang tertuang di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan/ Instruksi Bupati serta melakukan pengkoordinasian antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selain itu, Sekretariat Daerah menjalankan fungsi pembinaan administratif pemerintah daerah yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan sehingga menentukan kelancaran dan efektifitas kinerja birokrasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

b. Profesional

Profesional memiliki maksud bahwa Sekretariat Daerah mampu mewujudkan suatu kondisi pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang didukung aparatur dengan keterampilan dan pengetahuan serta sikap/perilaku secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.

c. Responsif

Responsif memiliki maksud bahwa Sekretariat Daerah mampu mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

d. Pelayanan publik (public service)

Pelayanan publik (public service) memiliki maksud bahwa Sekretariat Daerah harus mampu memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), dan harapan (*expectation*) masyarakat.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, interaksi sosial budaya, hukum, keagamaan dan kemasyarakatan.
- 2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang

berdaya saing.

- 3) Mewujudkan perekonomian berdasarkan keunggulan lokal.
- 4) Mewujudkan pengembangan infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah, kemudian dirumuskan 8 (delapan) **tujuan strategis** (*strategic goals*) Sekretariat Daerah sebagai pedoman arah gerak operasional pelaksanaan program kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- b) Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum;
- c) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri;
- e) Meningkatkan hubungan tata sosial budaya, penyelenggaraan keagamaan dan kemasyarakatan yang harmonis;
- f) Meningkatkan daya saing daerah guna peningkatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
- g) Meningkatkan perekonomian Masyarakat dengan penggunaan bahan produksi lokal.
- h) Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pemantauan pembangunan infrastuktur yang kokoh dan berkelanjutan.

Kedelapan tujuan tersebut menunjukkan peran sentral Sekretariat Daerah sebagai pusat dari pengaturan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah melingkupi seluruh urusan pemerintahan yang teknis kewenangannya didistribusikan

menjadi tugas pokok seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas, ditetapkan **sasaran-sasaran** pencapaian tujuan, sebagaimana berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan;
4. Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Meningkatnya OPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
6. Meningkatnya Standar Pelayanan di OPD/unit Kerja;
7. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
9. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
10. Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama;
11. Meningkatnya kualitas masyarakat dalam sosial budaya;
12. Meningkatnya Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan Kesehatan;
13. Meningkatkan keahlian dan keterampilan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah sebagai pemberdayaan Pelayanan;
14. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas kualitas dan kuantitas produksi daerah;
15. Berkembangnya ekonomi untuk pencapaian ekonomi kerakyatan yang maju;
16. Meningkatnya perencanaan dan pengembangan infrastruktur berkesinambungan; dan
17. Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur.

C. Kebijakan Strategis

Dalam upaya pencapaian sasaran prioritas selanjutnya disusun dan ditetapkan kebijakan strategis sebagai langkah-langkah yang perlu dilaksanakan pada upaya pencapaian sasaran tersebut. Penetapan kebijakan tersebut diperlukan untuk mensinergikan dan membangun keterpaduan langkah dan gerak pelaksanaan kegiatan-kegiatan, pengaturan tahap-tahap pencapaian tujuan berdasarkan prioritas, waktu, dan pertimbangan serta sebab-akibat antara program-kegiatan yang saling berkaitan.

Kebijakan strategis Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam upaya mewujudkan Visi-Misi Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas fungsi Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut :

- (1) Peningkatan kualitas pengkoordinasian OPD dalam proses perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- (2) Peningkatan kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas OPD;
- (3) Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- (4) Peningkatan kualitas pembinaan administrasi dan pembinaan aparatur pemerintah daerah; dan
- (5) Peningkatan kualitas fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah.

Penetapan kebijakan selanjutnya dijadikan landasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang menjadi langkah operasional perangkat kerja sekretariat daerah dalam pencapaian tujuan dan sasarannya. Susunan operasional upaya-upaya tersebut tercakup dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan memuat target kinerja out put/ out come secara jelas dan terukur, sehingga tingkat pencapaian target tahun berjalan sampai dengan target akhir tahun renstra dapat diketahui.

D. Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk mengukur capaian kinerja Sekretariat Daerah dalam kerangka pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan, dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2018, dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja dan Target Sekretariat Daerah Tahun 2018

SASARAN RESTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
Untuk mewujudkan islam yang sebenarnya dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat	Meningkatkan syiar nilai-nilai keagamaan melalui peringatan hari-hari besar keagamaan.	4 Kali peringatan hari besar
Mencetak generasi yang Qur'ani dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber panutan dan menyerap nilai-nilai luhur yang ada dikitab suci tersebut	Menumbuhkan semangat dan kecintaan terhadap Al-Qur'an dan mampu menjadi silaturahmi antar sesama umat	21 Cabang lomba
Untuk meningkatkan kuantitas ibadah di bulan suci Ramadhan	Agenda silaturahmi dan saling memaafkan di bulan suci Ramadhan	5 Kali 13 Kecamatan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Haji Kabupaten Tanjab Barat	Terfasilitasinya pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji serta pengiriman YKHD	2 Kali Fasilitasi
Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat	Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berinfak, Zakat, Sadaqah dan pengurangan kesenjangan sosial serta membangun standar pengelolaan zakat	3 Kali
Menjadikan LPTQ sebagai pusat unggulan pengkajian dan pengembangan tilawatil Qur'an	Meningkatkan pembinaan Qori-qoriah dalam wadah lembaga pengembangan Al-Qur'an (LPTQ) sehingga menghasilkan Qori-qoriah yang berprestasi	5 Kali
Generasi yang shaleh dan shalehah	Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pada anak usia dini	2 Kali

Terciptanya Qori dan Qoriah, Hafiz dan hafizah, khattah dan khattatah, mufassir dan mufasirah yang mampu untuk mewakili Kab. Tanjab Barat	Meningkatkan kualitas dan prestasi Qori Qoriah Kab Tanjab Barat pada MTQ Tingkat Provinsi	3 Tahapan
Menyemai kesadaran beragama rasional kritis berkemajuan dalam rangka mebangun peradaban muslim untuk mencapai izzul islam	Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan beragama & pembangunan akhlak manusia	2 Kali Pembinaan
Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatkan pelaksanaan pendidikan keagamaan dan peribadatan serta pengajian tentang ilmu-ilmu agama	3710 Orang
Dengan Al-Qur'an penyelenggaraan MTQ mari kita jadikan Al-Quran sebagai Pedoman Kehidupan	Pengiriman kafilah MTQ Kabupaten Tanjab Barat pada MTQ Tingkat Provinsi	21 Cabang
Pemantapan organisasi UKS	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan UKS di Kab.Tanjab Barat	2 Kali Rapat
Kita harus mengurus lansia dengan sungguh-sungguh karena kelak kita juga ingin jadi lansia	Terkoordinirnya kegiatan pembinaan Komda lansia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Kali Rapat
Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan guna memberikan pencerahan kepada umat	Mendorong peningkatan kehidupan beragama yang islami	6 Fasilitasi MUI
Menyelesaikan proses pencatatan pernikahan bagi masyarakat	Tersedianya hak pengakuan hukum atas perkawinan dan status anak.	2446 Orang 10 Kecamatan
Terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Tanjab Barat	- Termotivasinya aparatur Kecamatan dalam meningkatkan kinerja - Meningkatnya persentase camat yang memenuhi standar penilaian camat teladan	Camat Teladan I, II dan III 13 Kecamatan
Terwujudnya tertib administrasi Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat dengan Kabupaten yang berbatasan	Terwujudnya tertib administrasi, batas pemerintahan Kabupaten Tanjab Barat dengan Kabupaten yang berbatasan serta batas kecamatan	Batas Kecamatan dan Kabupaten

<p>Terwujudnya tertib administrasi di bidang pem - bakuan nama-nama rupabumi</p> <p>Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), terlaksananya persiapan tahapan pemilu, pilkada dan pilpres.</p> <p>Terlaksananya peringatan HUT RI dan HUT Kab Tanjab Barat</p> <p>Terwujudnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar pimpina daerah.</p>	<p>Terlaksananya pembinaan dan pembakuan nama - nama Rupabumi di wilayah Kabupaten Tanjab Barat</p> <p>Terselesainya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan kesiapan pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilkada</p> <p>HUT RI dan HUT Kabupaten Tanjab Barat, serta menumbuhkembangkan rasa nasionalisme kepada bangsa dan daerah</p> <p>Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar pimpinan daerah dan meningkatkan Pembangunan, keamanan dan kesejahteraan daerah</p>	<p>Gasetir (Data)</p> <p>Score 3.3305</p> <p>1 Kali HUT RI dan 1 Kali HUT KAB</p> <p>6 Kali Rapat</p>
<p>Terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diwilayah Tanjab Barat , pelayanan adm terpadu di Kec.</p> <p>Terwujudnya kerjasama yang baik antar daerah dan lembaga</p>	<p>Terlaksananya pelayanan terpadu di kecamatan demi terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat</p> <p>Terlaksananya kerjasama pemerintah daerah kabupaten Tanjab Barat dengan pemerintah daerah lain dan dengan lembaga-lembaga lainnya</p>	<p>13 Kecamatan</p> <p>6 MOU</p>
<p>Meningkatnya ketatalaksanaan OPD yang efektif dan efisien.</p> <p>Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p>	<p>Persentase Perangkat Daerah dengan Akuntabilitas yang bernilai B</p> <p>Indeks Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>Persentase Analisis Jabatan Perangkat daerah sesuai Pedmoan Penyusunan Analisis jabatan</p>	<p>100%</p> <p>100 %</p> <p>100%</p>

Perkembangan investasi dan BUMD	Persentase jumlah evaluasi terhadap setiap usulan kegiatan/kebutuhan BUMD	12 Kali, 13 Kecamatan
Terjalannya koordinasi antar daerah	Meningkatnya jumlah daerah yang dijajaki untuk menjalin kerjasama dengan Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Barat	10 Kali, 3 Daerah
Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat melalui kegiatan penanganan permasalahan perekonomian	- Meningkatkan tingkat pengendalian terhadap inflasi	10 Kali, 13 Kecamatan
	- Persentase pelaksanaan koordinasi penanganan permasalahan ekonomi yang timbul	36 Kali, 13 Kecamatan
	- Tersalurnya beras rastra untuk masyarakat miskin	13 Kecamatan
	Terpenuhinya pengembalian tunggakan KUPEM	23 Orang
	- Persentase penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran	13 Kecamatan
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Jumlah raperda dan produk hukum daerah lainnya	100 %, 10 Perda
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Jumlah keputusan Bupati dan instruksi Bupati	100 %, 800 Keputusan dan Instruksi Bupati
Pengelolaan bahan dokumentasi dan penyebaran produk hukum	Jumlah produk hukum daerah yang disebarluaskan	100 %, 300 Buku, 1 Dokumen
Terselesaikannya perkara Hukum Pemkab	Penanganan perkara Hukum	100 %, 3 Kasus
Terwujudnya masyarakat taat Hukum	Jumlah laporan inventarisasi data kegiatan ranham	100 %, 4 Kali Laporan aksi HAM, 2 Kali laporan Monitoring Aks HAM, 1 Kali Lomb Kadarkum, 1 Kali Laporan Desa/Kel. Sada r Hukum 100%
Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan hukum	6 DS/Kel, 300 Orang
Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur	- Penyediaan data laporan OPD dan ULP, Data	24 Buku, 10 Laporan
	proyek fisik pembangunan Kabupaten Tanjab Barat,	29 Buku

	Renja, IKU, dan Perkin Setda Tanjab Barat. - Persentase rekomendasi/saran/usulan percepatan pembangunan - Persentase saran pemanfaatan outcome pembangunan yang terkoordinasi	50 Buku 4 rekomendasi 100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase akuntabilitas kinerja Setda 2018	12 Buku
Meningkatnya keahlian dan keterampilan sdm pemerintah daerah sebagai pemberdayaan pelayanan	Meningkatkan SDM pengelola LPPK dan anggota pokja ULP dan pengelola pengadaan barang/jasa OPD Kabupaten Tanjung jabung barat	50 Orang 1 Kali
, - Meningkatnya kinerja pelayanan kearsipan, pengiriman dan penerimaan surat dinas, berita-berita dinas. Distribusi surat secara tertib, lancar dan tepat waktu	, - Terciptanya kondisi tempat kerja yang bersih dan nyaman dan tersedianya peralatan kerja yang baik.	100%
, - Terpeliharanya ketenangan dan kenyamanan tempat kerja Terciptanya ketenangan dan kenyamanan tempat kerja	- Meningkatnya kinerja aparatur sipil negara	100%
Tersusunnya perencanaan kebutuhan alat penunjang aparatur sipil negara yang sesuai kebutuhan	Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan serta alat penunjang operasional aparatur sipil negara sesuai kebutuhan	100%
Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur sipil negara	Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang operasional aparatur sipil negara	100%
Tersedianya perencanaan kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektif	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan perlengkapan pegawai Setda dalam skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah	100%
Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah yang efektif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan	- Tersusunnya rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang setda - Terpeliharanya BMD setda dengan baik	100%
Menciptakan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu, terkoordinasi dan terkendali	- Terlaksananya fasilitas, koordinasi dan terpadu pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan	13 Kecamatan
	- Terlaksananya koordinasi, pemantauan dan pengendalian pengelolaan bidang kehutanan	13 Kecamatan

	- Terlaksananya koordinasi & terpantaunya bidang pembaguna perikanan	13 Kecamatan
	- Terlaksananya fasilitas, koordinasi, Monev pembangunan bidang ketahanan pangan	13 Kecamatan
	- Terlaksananya koordinasi & terpantaunya pembangunan bidang sumber daya air	13 Kecamatan
	- Tersusunnya buku sumber daya alam sebagai acuan pelestarian SDA	50 Buku
	- Terlaksananya fasilitas, koordinasi, pemantauan dan pengendalian bidang pertambangan dan energi	13 Kecamatan
	- Terlaksananya koordinasi & terpantaunya pembangunan bidang lingkungan hidup	13 Kecamatan
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Kearsipan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Sekretariat Daerah dengan baik tertib dan lancar	Tertip pengelola administrasi perkantoran	12 Bulan
Terpeliharanya kebersihan rumah jabatan/ dinas	- Jumlah pemeliharaan rutin rumah jabatan/dinas untuk kepentingan dinas - Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan kinerja	3 Rumah Dinas
Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis bagi Aparatur Sipil Negara	Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti Bimtek/pelatihan singkat yang sesuai dengan tupoksi	8 Orang
Memotivasi peningkatan Kapasitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara		
Pelaporan pelaksanaan kegiatan dengan baik dan tepat waktu	Jumlah laporan pelaksanaan capaian kinerja dan keuangan	4 Buku
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
Kelancaran tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah	- Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga pemerintah non departemen /luar Negeri.	20 Kali

	- Jumlah kunjungan kerja / inspeksi ke daerah dan koor - dinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	10 Kali
Peningkatan Kerjasama dan Layanan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Media Masa dan Peningkatan Optimalisasi dan Efektivitas Pemberitaan Pimpinan	- Terwujudnya optimalisasi efektivitas pemberitaan Pembangunan serta layanan informasi publikasi dan Diseminasi informasi yang merata dan berimbang kepada Masyarakat - Terwujudnya penghimpunan, Pengolahan dan layanan Dokumentasi dengan baik, valid, akurat dan dapat diakses sesuai kebutuhan.	12 Bulan 12 Bulan

Sumber : Data dari seluruh Bagian Tahun 2018

E. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, tugas pokok Sekretariat Daerah dikoordinasikan oleh 3 Asisten, dan dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) bagian, sehingga penetapan kinerja Sekretariat Daerah merangkum rencana pencapaian kinerja bagian-bagian.

Rincian penetapan kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di wilayah Tanjab Barat	Termotivasinya aparatur kecamatan dalam meningkatkan kinerja Meningkatnya persentase Camat yang memenuhi standar penilaian Camat teladan	Terbaik I, II dan III
2	Terwujudnya tertib administrasi Pemerintah Kab. Tanjab Barat dengan Kabupaten yang berbatasan serta batas antar kecamatan	Terwujudnya tertib administrasi, batas pemerintahan Kab. Tanjab Barat dengan Kabupaten yang berbatasan serta batas kec.	100%
3	Terwujudnya tertib administrasi di bidang pembakuan nama-nama rupa bumi.	Terlaksananya pembinaan dan pembakuan nama-nama rupabumi di wilayah Tanjabbar	Gasetir (data)
4	Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), terlaksananya persiapan tahapan pemilu, Pilkada, Pilpres	Terselesainya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), dan kesiapan pelaksanaan pemilu, pilpres dan pilkada	100%
5	Terlaksananya peringatan HUT RI dan HUT Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya peringatan HUT RI dan HUT Kab. Tanjab Barat. Menumbuhkembangkan rasa nasionalisme kepada bangsa dan daerah	1 kali HUT RI dan HUT Kab. Tanjab Barat
6	Terwujudnya komunikasi & koordinasi yang baik antar pimpinan daerah	Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar pimpinan daerah dan meningkatkan pembangunan keamanan dan kesejahteraan daerah	6 kali

7	Terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kab. Tanjab Barat. Pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan	Terlaksananya pelayanan terpadu di kecamatan demi terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat	13 Kecamatan
8	Terwujudnya kerja yang baik antar daerah dan lembaga	Terlaksananya kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Tanjab Barat dengan dengan pemerintah daerah lain dan dengan lembaga-lembaga lainnya	5 MoU
9	Untuk mewujudkan islam yang sebenarnya dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat	Meningkatkan syiar nilai-nilai keagamaan melalui peringatan hari-hari besar keagamaan	4 Kali Peringatan Hari besar
10	Mencetak generasi yang Qur'ani dan menjadikan Al Qur'an sebagai sumber panutan dan menyerap nilai-nilai luhur yang ada dikitab suci tersebut	Menumbuhkan semangat dan kecintaan terhadap Al Qur'an & mampu menjadi silaturahmi antar sesama umat	21 Cabang Lomba
11	Untuk meningkatkan kuantitas ibadah di bulan suci Ramadhan	Agenda silaturahmi dan saling memaafkan di bulan suci Ramdhan	5 Kali 13 Kecamatan
12	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Haji Kab. Tanjab Barat	Terfasilitasinya pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji serta pengiriman TKHD	2 Kali Fasilitasi
13	Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat	Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berinfak, zakat, sadaqah dan pengurangan kesenjangan sosial serta membangun standar pengelolaan zakat	3 Kali
14	Menjadikan LPTQ sebagai pusat unggulan pengkajian & pengemba – bangan tilawatil Qur'an.	Meningkatkan pembinaan Qori-qoriah dalam wadah lembaga pengembangan Al Qur'an (LPTQ) sehingga menghasilkan Qori-qoriah yang berprestasi	5 Kali
15	Generasi yang shaleh dan shalehah	Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pada anak usia dini	2 Kali
16	Terciptanya Qori dan Qoriah, Hafiz dan Hafizah, Khattah dan Khattatah,	Meningkatkan kualitas dan prestasi Qori dan Qoriah	3 Kali Tahapan

	musafir dan musafirah yang mampu untuk mewakili Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada MTQ Tingkat provinsi	
17	Menyemai kesadaran beragama rasional kritis berkemajuan dalam rangka membangun peradaban muslim untuk mencapai izzul islam	Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan pembangunan akhlak akhlak manusia	2 Kali Pembinaan
18	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatkan pelaksanaan pendidikan keagamaan dan peribadatan serta pengajian tentang ilmu-ilmu agama	3710 Orang
19	Dengan Al Qur'an penyelenggaraan MTQ mari kita jadikan Al Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan	Pengiriman kafilah MTQ Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada MTQ tingkat provinsi	21 Cabang Lomba
20	Pemantapan organisasi UKS	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan UKS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2 Kali Rapat
21	Kita harus mengurus lansia dengan sungguh-sungguh karena kelak kita juga ingin jadi lansia	Terkoordinirnya kegiatan pembinaan komda lansia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Kali Rapat
22	Melakukan pembimbingan dan penyuluhan guna memberikan pencerahan kepada umat	Mendorong peningkatan kehidupan beragama yang islam	6 Fasilitasi MUI
23	Penyelesaian proses pencatatan pernikahan bagi masyarakat	Tersedianya hak pengakuan hukum atas perkawinan dan status anak	2446 Orang 10 Kecamatan
24	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Jumlah Ranperda dan produk hukum daerah lainnya	10 Perda 30 Perbup
25	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Jumlah keputusan Bupati dan instruksi Bupati	800 Keppup dan Instruksi Bupati
26	Pengelolaan bahan dokumentasi penyebaran produk hukum	Jumlah produk hukum daerah yang disebarluaskan	300 Buku
27	Terselesainya perkara hukum pemkab	Penanganan perkara hukum	3 Kasus
28	Terwujudnya masyarakat taat hukum	Jumlah laporan inventarisasi data kegiatan ranham	4 Kali Laporan Aksi HAM

29	Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan hukum	2 Kali Laporan Monitoring Aksi Ham 1 Kali Lomba Kadarkum 1 Kali Laporan Desa/Kel Sadar Hukum 6 Desa/Kelurahan 300 Orang
30	Peningkatan kerjasama dan layanan kemitraan pemerintah daerah dengan media massa dan peningkatan optimalisasi dan efektivitas pemberitaan pimpinan	Terwujudnya optimalisasi efektivitas pemberitaan pembangunan serta layanan informasi publikasi dan desiminasi informasi yang merata dan berimbang kepada masyarakat Terwujudnya penghimpunan, pengolahan, dan layanan dokumentasi dengan baik, valid, akurat dan dapat diakses sesuai kebutuhan	1 Tahun 1 Tahun
31	Menciptakan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu terkoordinasi dan terkendali	Terpenuhinya fasilitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan Terpenuhinya koordinasi pemantauan dan pengendalian pengelolaan bidang kehutanan Terpenuhinya koordinasi dan terpantaunya pembangunan bidang perikanan Terpenuhi fasilitas, koordinasi monitoring dan evaluasi pembangunan bidang ketahanan pangan Terpenuhi koordinasi dan terpantaunya pembangunan bidang sumber daya air Terpenuhi buku sumber daya alam sebagai acuan pelestarian SDA Terpenuhi fasilitas, koordinasi,	13 Kecamatan 13 Kecamatan 13 Kecamatan 13 Kecamatan 50 Buku 13 Kecamatan

		terpantaunya pembangunan bidang lingkungan hidup	
		Terpenuhi fasilitas, koordinasi, pemantauan dan pengendalian bidang pembangunan dan energi	13 Kecamatan
32	Berkembangnya investasi dan BUMD	Persentase jumlah evaluasi terhadap setiap usulan kegiatan/kebutuhan BUMD	12 Kali 13 Kecamatan
33	Terjadinya koordinasi antar daerah	Meningkatnya jumlah daerah yang dijangkau untuk menjalin kerjasama dengan Pemkab Tanjung Jabung Barat	10 Kali 3 Daerah
34	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat melalui kegiatan penanganan permasalahan perekonomian	Meningkatnya tingkat pengendalian terhadap inflasi	10 Kali 13 Kecamatan
		Persentase pelaksanaan koordinasi penanganan permasalahan ekonomi yang timbul	36 Kali 13 Kecamatan
		Terselurnya beras rastra untuk masyarakat miskin	13 Kecamatan
		Terpenuhinya pengembalian tunggakan KUPEM	23 Orang
		Persentase penyaluran pupuk bersubsidi	13 Kecamatan
35	Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur	Terpenuhinya pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan	100%
		Tersusunnya Renstra, Renja, Tapkin dan IKU Setda Tanjab Barat	50 Buku
		Tersedianya data pembangunan proyek fisik	30 Buku
		Terpenuhinya pendataan outcome pelaksanaan pembangunan	12 saran
		Terpenuhinya laporan OPD dan penurunan tingkat pemborosan kegiatan	24 Buku

		LPPK OPD	
		Terpenuhinya laporan pengadaan barang jasa	20 Laporan
		Terpenuhinya monitoring, pemantauan, evaluasi dan laporan pembangunan	10 Laporan
		Terpenuhinya koordinasi dan sinkronisasi percepatan pembangunan	4 Saran/Usulan/ Rekomendasi
		Unit layanan pengadaan	100%
36	Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur	Terpenuhinya LAKIP Setda 2017	12 Buku
37	Meningkatnya keahlian dan keterampilan SDM pemerintah daerah sebagai pemberdayaan pelayanan	Meningkatnya SDM pengelola LPPK	50 Orang
		Meningkatnya SDM anggota Pokja ULP	1 Kali
38	Meningkatnya ketatalaksanaan OPD yang efektif dan efisien	Persentase perangkat daerah dengan Akuntabilitas yang bernilai B	100
39	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam Kab. Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	100
		Persentase analisis jabatan Perangkat Daerah sesuai pedoman penyusunan analisis jabatan	100
40	Meningkatnya kinerja pelayanan kearsipan, pengiriman dan penerimaan surat dinas, berita-berita dinas, distribusi surat secara tertib, lancar dan tepat waktu	Tertib pengelolaan administrasi perkantoran	12 Bulan
41	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas beserta	Jumlah pemeliharaan rutin rumah jabatan/dinas untuk kepentingan dinas	3 Rumah Jabatan/Dinas
42	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis bagi aparatur sipil negara	Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti bimtek/pelatihan singkat yang sesuai dengan tupoksi	8 Orang
43	Pelaporan pelaksanaan kegiatan dengan baik dan tepat waktu	Jumlah laporan pelaksanaan capaian kinerja dan keuangan	4 Buku
	Tersusunnya laporan keuangan	Jumlah buku laporan capaian	

44	<p>pertahun anggaran sehingga diketahui capaian keuangan dalam anggaran tersebut</p> <p>Kelancaran tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah</p>	<p>kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p> <p>- Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri</p> <p>- Jumlah penerimaan kunjungan kerja/inspeksi ke daerah dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya</p>	<p>Penerimaan 20 Kali Kunjungan</p> <p>10 Kali Kunjungan Kerja</p> <p>75 OH</p>
45	<p>Terlaksananya pengelolaan sarana penunjang pelayanan administrasi perkantoran di sekretariat daerah dengan baik dan tertib</p>	<p>Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan akan alat penerangan dan komponen instalasi listrik sehingga terciptanya tempat kerja yang nyaman</p>	<p>2 (dua) Acara Kenegaraan Antara Lain:</p> <p>- Acara HUT RI - Acara HUT Kab. Tanjung Jabung Barat</p>
46	<p>Tersedianya perencanaan kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas</p>	<p>Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan serta alat penunjang operasional aparatur sipil negara sesuai kebutuhan</p>	<p>2 (dua) Dokumen Perencanaan</p> <p>5 (lima) Dokumen Pengawasan</p>
47	<p>Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur sipil negara</p>	<p>- Tercukupnya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang operasional aparatur sipil negara</p> <p>- Terpeliharanya sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kinerja</p>	<p>30 Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana</p> <p>1 Paket Asuransi Gedung Kantor, dan 9 Paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</p> <p>4 Paket Asuransi Kendaraan Dinas Operasional, dan 153 Unit Kendaraan Dinas Operasional</p>

			<p>27 Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</p> <p>10 Paket Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor</p>
48	Memotivasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan perlengkapan pegawai setda dalam skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah	
49	Terlaksananya pendataan dan pelaporan aset Setda secara tertib dan tepat waktu	Terwujudnya pengelolaan aset/barang daerah secara tertib	

Sumber : Data seluruh Bagian Tahun 2018

F. Alokasi Anggaran Menurut Bagian dan Jenis Belanja Program

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018, diuraikan menurut alokasi anggaran per unit bagian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Menurut Bagian

No	Nama Bagian	Jumlah (Rp.)
1.	Bagian Organisasi	1.010.379.000,-
2.	Bagian Umum	11.992.586.441,-
3.	Bagian Sumber Daya Alam	740.852.540,-
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	15.564.199.215,-
5.	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.567.468.400,-
6.	Bagian Administrasi Pembangunan	2.753.992.000,-
7.	Bagian Hukum	1.129.612.300,-
8.	Bagian Perekonomian	803.210.500,-
9.	Bagian Komunikasi dan Dokumentasi	3.700.120.050,-
10.	Bagian Sarana dan Prasarana	9.188.114.416,-
	JUMLAH	48.450.534.862,-

Sumber : Data Bagian ADP Tahun 2018

Sedangkan Dukungan alokasi program yang dikelola Bagian dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Alokasi Jenis Belanja Program Setda Tanjab Barat Tahun 2018

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1	Program Ketahanan Ekonomi	- Cakupan Pengendalian terhadap Inflasi	65%	65%	100
		- Persentase rencana hasil koordinasi penanganan permasalahan ekonomi yang timbul yang ditindaklanjuti.	90%	90%	100
		- Persentase penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran	100%	100%	100
2	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	Jumlah daerah yang dijajaki untuk menjalin kerjasama dengan pemda Kab. Tanjung Jabung Barat	2 Daerah	2 Daerah	100
3	Program kerjasama dengan media massa	Jumlah kerjasama informasi dan publikasi	7	7	100
4	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase penyebaran informasi kegiatan Kepala/ Wakil Daerah serta kegiatan pemerintahan daerah	85%	85%	100
5	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi PATEN	13 Kec.	13 Kec.	100
		Jumlah kerjasama antar daerah dan lembaga disetiap bidang	6 Mou	6 Mou	100
		Persentase ketersediaan data LPPK PD dan Laporan ULP yang benar	100%	100%	100
		Persentase rekomendasi/ saran/ usulan percepatan pembangaunan yang dikoordinasikan	100%	100%	100
		Persentase saran pemanfaatan outcome pembangunan yang dikoordinasikan	100%	100%	100

		indeks kualitas pelayanan publik	74,5	74,5	100
		Persentase PD dengan akuntabilitas kinerja yang bernilai B	95%	95%	100
		Persentase analisis jabatan PD sesuai pedoman penyusunan analisis jabatan	85%	85%	100
6	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Camat yang memenuhi standar penilaian Camat teladan	100.0%	100.0%	100
7	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Tingkat kesadaran dalam beragama, berbangsa dan bernegara	92%	92%	100
8	Program pengembangan wilayah perbatasan	persentase batas kabupaten yang memenuhi tertib administrasi	80%	80%	100
9	Program laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Skor penilaian LPPD Kab. Tanjab Barat	3.3305	2.7439	82.39
10	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah pelaksanaan rakor forkompinda	6 kali	5 kali	83.33
11	Program kerjasama dengan media massa	Jumlah kerjasama informasi dan publikasi	7	7	100
12	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase penyebaran informasi kegiatan Kepala/ Wakil Daerah serta kegiatan pemerintahan daerah	85%	85%	100
13	Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	Persentase pengaduan terkait lingkungan yang ditindaklanjuti(bila ada pengaduan)	100%	100%	100
		Persentase pelaksanaan fasilitas bidang SDA	100%	100%	100

14	Program pembinaan dan pengawasan Bidang pertambangan dan Energi	Persentase jumlah pengaduan bidang pertambangan dan energi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
15	Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah buku rencana kebutuhan barang milik daerah dan buku rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100
16	Program Pengelolaan kekayaan daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Jumlah objek aset(tanah) yang dikelola	3 bidang tanah	-	0
17	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase tingkat kelancaran tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kunjungan/ acara	100%	100%	100
18	Program keagamaan dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait bidang keagamaan dan kemasyarakatan	100%	100%	100
		Jumlah murid ngaji yang bisa baca Al Quran	100 murid	10.958 murid	10958
		Jumlah peserta pendidikan keagamaan di masyarakat desa/kelurahan	22322 orang	16.841 orang	75.45
19	Program penataan peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah sesuai pendoman penyusunan produk hukum daerah	100%	220%	220
20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah masyarakat umum yang mengakses produk hukum daerah	600 orang	600 orang	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun anggaran 2018, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan 20 Program Kegiatan, 49 (empat puluh sembilan) sasaran yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 64 (enam puluh empat) Indikator Kinerja. Realisasi kinerja pada akhir tahun menunjukkan bahwa secara keseluruhan target sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata persentase pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan adalah 100,74 %. Suatu organisasi dinyatakan berhasil apabila hasil capaian target kinerjanya melebihi 80% dari target kinerja perencanaan yang ditetapkan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran yang dicapai. Rincian tingkat capaian kinerja indikator sasaran pada masing-masing tujuan, secara umum diuraikan dalam tabel-tabel berikut :

Pengukuran Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tabel 3

Tabel 3

CAPAIAN KINERJA SETDA TANJAB BARAT TAHUN 2018

NO	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama/IKU OPD	Target	Capaian
BAGIAN KESRA & KEAGAMAAN				
1	Untuk mewujudkan islam yang sebenarnya dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat.	Meningkatkan syiar nilai-nilai keagamaan melalui peringatan hari-hari besar keagamaan.	4 Kali peringatan hari besar	4 Kali peringatan hari besar
2	Mencetak generasi yang Qur'ani dan menjadikan Al-quran sebagai sumber panutan dan menyerap nilai-nilai luhur yang ada dikitab suci tersebut.	Menumbuhkan semangat dan kecintaan terhadap Al-Qur'an dan mampu menjadi silaturahmi antar sesama umat	21 Cabang lomba	21 Cabang lomba
3	Untuk meningkatkan kuantitas ibadah di bulan suci Ramadhan	Agenda silaturahmi dan saling memaafkan di bulan suci Ramadhan	5 Kali	5 Kali
4	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Haji Kabupaten Tanjab Barat	Terfasilitasinya pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji serta pengiriman TKHD	2 Kali Fasilitasi	2 Kali Fasilitasi
5	Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat	Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berinfak, Zakat, Sadaqah dan pengurangan kesenjangan sosial serta membangun standar pengelolaan zakat	3 Kali	3 Kali
6	Menjadikan LPTQ sebagai pusat unggulan pengkajian dan pengembangan tilawatil Qur'an	Meningkatkan pembinaan Qori-qoriah dalam wadah lembaga pengembangan Al-Qur'an (LPTQ) sehingga menghasilkan Qori-qoriah yang berprestasi	5 Kali	5 Kali
7	Generasi yang shaleh dan shalehah	Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pada anak usia dini	2 Kali	2 Kali

8	Terciptanya Qori dan Qoriah, Hafiz dan hafizah, khattah dan khattatah, mufassir dan mufasirah yang mampu untuk mewakili Kab. Tanjab Barat	Meningkatkan kualitas dan prestasi Qori Qoriah Kab Tanjab Barat pada MTQ Tingkat Provinsi	3 Tahapan	3 Tahapan
9	Menyemai kesadaran beragama rasional kritis berkemajuan dalam rangka membangun peradaban muslim untuk mencapai izzul islam	Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan pembangunan akhlak manusia	2 Kali Pembinaan 134 da'i	2 Kali Pembinaan 134 da'i
10	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatkan pelaksanaan pendidikan keagamaan dan peribadatan serta pengajian tentang ilmu-ilmu agama	3710 Orang	3684 Orang
11	Dengan Al-Qur'an penyelenggaraan MTQ mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan	Pengiriman kafilah MTQ Kabupaten Tanjab Barat pada MTQ Tingkat Provinsi	21 Cabang Lomba	21 Cabang Lomba
12	Pemantapan organisasi UKS	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan UKS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2 Kali Rapat	2 Kali Rapat
13	Kita harus mengurus lansia dengan sungguh-sungguh karena kelak kita juga ingin jadi lansia	Terkoordinirnya kegiatan pembinaan Komda lansia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Kali Rapat	1 Kali Rapat
14	Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan guna memberikan pencerahan kepada umat	Mendorong peningkatan kehidupan beragama yang islami	6 Fasilitasi MUI	6 Fasilitasi MUI
15	Menyelesaikan proses pencatatan pernikahan bagi masyarakat	Tersedianya hak pengakuan hukum atas perkawinan dan status anak	594 orang, 3 Kecamatan	594 orang, 3 Kecamatan

BAGIAN PEM.OTDA				
1	Terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Tanjab Barat	- Termotivasinya aparaturnya Kecamatan dalam meningkatkan kinerja. - Meningkatnya persentase Camat yang memenuhi standar penilaian Camat teladan	100% (Terbaik I, II dan III) 13 Kecamatan	100% (Terbaik I, II dan III) 13 Kecamatan
2	Terwujudnya tertib administrasi Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat dengan Kabupaten yang berbatasan	Terwujudnya tertib administrasi, batas pemerintahan Kabupaten Tanjab Barat dengan Kabupaten yang berbatasan serta batas kecamatan	Batas Kecamatan dan Kabupaten / 100 %	Batas Kecamatan dan Kabupaten / 100%
3	Terwujudnya tertib administrasi di bidang pembakuan nama-nama rupabumi	Terlaksananya pembinaan dan pembakuan nama-nama Rupabumi di wilayah Kabupaten Tanjab Barat	100 % Gasetir (Data)	100 % Gasetir (Data)
4	Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) terlaksananya persiapan tahapan pemilu, pilkada, pilpres	Terselesainya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan kesiapan pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilkada	100 % (Score 3.3305)	91% (score 2.7439)
5	Terlaksananya peringatan HUT RI dan HUT Kab. Tanjab Barat Tanjab Barat	HUT RI dan HUT Kabupaten Tanjab Barat, serta menumbuhkan kebanggaan rasa nasionalisme kepada bangsa dan daerah	1 Kali HUT RI dan 1 Kali HUT KAB	1 Kali HUT RI dan 1 Kali HUT KAB
6	Terwujudnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar pimpinan daerah	Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar pimpinan daerah dan meningkatkan pembangunan keamanan dan kesejahteraan daerah	6 Kali Rapat	5 Kali Rapat

7	Terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kab Tanjab Barat pelayanan administrasi terpadu di kecamatan	Terlaksananya pelayanan terpadu di kecamatan demi terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat	13 Kecamatan	10 Kecamatan
8	Terwujudnya kerjasama yang baik antar daerah dan lembaga	Terlaksananya kerjasama pemerintah daerah kabupatn Tanjab Barat dengan pemerintah daerah lain dan dengan lembaga-lembaga lainnya	5 MOU	5 MOU
BAGIAN ORGANISASI				
1	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Akuntabilitas Perangkat Daerah yang bernilai B	100%	100%
		Indeks Kualitas Pelayanan Publik	100%	100%
		Persentase analisis jabatan PD sesuai pedoman - penyusunan analisis jabatan	100%	100%
BAGIAN PEREKONOMIAN				
1	Perkembangan investasi dan BUMD	Persentase jumlah evaluasi terhadap setiap usulan kegiatan/kebutuhan BUMD	12 Kali (13 Kecamatan)	12 Kali (13 Kecamatan)
2	Terjalannya koordinasi antar daerah	Meningkatnya jumlah daerah yang dijajaki untuk menjalin kerjasama dengan Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Barat	10 Kali, 3 Daerah	10 Kali, 3 Daerah
3	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat melalui kegiatan penanganan permasalahan perekonomian	- Meningkatkan tingkat pengendalian terhadap inflasi	10 Kali (13 Kecamatan)	10 Kali (13 Kecamatan)

		<p>- Persentase pelaksanaan koordinasi penanganan permasalahan ekonomi yang timbul</p> <p>- Tersalurnya beras rastra untuk masyarakat miskin</p> <p>Terpenuhinya pengembalian tunggakan KUPEM</p> <p>- Persentase penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran</p>	<p>36 Kali, 13 Kec.</p> <p>13 Kecamatan</p> <p>23 Orang / 100%</p> <p>13 Kecamatan</p>	<p>36 Kali, 13 Kec.</p> <p>13 Kecamatan</p> <p>1 Orang / 75 %</p> <p>13 Kecamatan</p>
	BAGIAN HUKUM			
1	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Jumlah raperda dan produk hukum daerah lainnya	100 %, 10 Perda	110 %, 22 Perda
2	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Jumlah keputusan Bupati dan instruksi Bupati	100 %, 800 Keputusan dan Instruksi Bupati	154 %, 1233 Keputusan dan 3 Instruksi Bupati
3	Pengelolaan bahan dokumentasi dan penyebar	Jumlah produk hukum daerah yang disebarluaskan	100 %, 300 Buku, 1 Dokumen	100 %, 300 Buku, 1 Dokumen
4	luasan produk hukum Terseselaikannya perkara Hukum Pemkab	Penanganan perkara Hukum	100 %, 3 Kasus	100 %, 3 Kasus
5	Terwujudnya masyarakat taat Hukum	Jumlah laporan inventarisasi data kegiatan ranham	100 %, 4 Kali Laporan aksi HAM, 2 Kali laporan Monitoring Aksi HAM, 1 Kali Lomba Kadarkum, 1 Kali Laporan Desa/Kel. Sadar Hukum	100 %, 4 Kali Laporan aksi HAM, 0 Kali laporan Monitoring Aks HAM, 1 Kali Lomb Kadarkum, 1 Kali Laporan Desa/Kel. Sadar Hukum

6	Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan hukum	100 %, 6 Desa/Kel , 600 Orang	100 %, 6 Desa/Kel, 600 Orang
BAGIAN ADP				
1	Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktr	<p>Terpenuhinya pembinaan dan koordinasi perencanaan</p> <p>Tersusunnya Renstra, Renja, Tapkin, dan IKU Setda</p> <p>Tersedianya data pembangunan proyek fisik</p> <p>Terpenuhinya pendataan outcome pembangunan</p> <p>Terpenuhinya laporan LPPK OPD & Penurunan tingkat pemborosan anggaran</p> <p>Terpenuhinya laporan pengadaan barang/jasa, ULP</p> <p>Terpenuhinya monev dan pemantauan pembangunan</p> <p>Terpenuhinya koordinasi & sinkronisasi percepatan</p>	<p>100%</p> <p>50 buku</p> <p>30 Buku</p> <p>12 saran / 30 %</p> <p>24 buku</p> <p>20 buku/laporan, 100%</p> <p>10 laporan / 70 %</p> <p>12 bulan / 30 %</p>	<p>100.00%</p> <p>50 buku</p> <p>30 Buku</p> <p>1 saran / 28 %</p> <p>24 Buku</p> <p>100%</p> <p>65%</p> <p>12 bulan /29%</p>
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Terpenuhinya laporan akuntabilitas kinerja Setda 2017	12 Buku	12 Buku
3	Meningkatnya keahlian dan keterampilan sdm pemerintah daerah sebagai pemberdayaan pelayanan	Meningkatkan SDM pengelola LPPK dan anggota pokja ULP dan pengelola pengadaan barang/jasa OPD Kabupaten Tanjung jabung barat	50 Orang 1 Kali	0 Orang 1 Kali

BAGIAN SAPRAS				
1	Terlaksananya pengelolaan sarana penunjang pelayanan adm.perkantoran di Setda Tanjab Barat dengan baik dan tertib	,-Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor ; -Terpenuhinya kebutuhan alat penerangan dan komponen listrik sehingga terciptanya tempat kerja yang nyaman.	100%, 2 acara HUT.	75%, 2 paket acara HUT
2	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur sipil negara	Tercukupinya kebutuhan sarana prasarana operasional Terpeliharanya sarana prasarana penunjang peningkatan kinerja	100%/ 30 paket pengadaan Pemeliha raan rutin : 1 paket asuransi gedung kantr 4 paket asuransi kendaraan Dinas 12 bln/9 paket gedung kantor 153 paket kendaraa n dinas 100 %/27 paket peralatan 100%/10 paket rehab gedung	100%/ 30 paket pengadaan 100% 4 paket asuransi kendaraan Dinas 12 bln/9 paket gedung kantor 153 paket kendaraan dinas 100% 100%
3	Tersusunnya perencanaan kebutuhan alat penunjang aparatur sipil negara yang sesuai kebutuhan secara efisien dan efektif.	Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan serta alat penunjang operasional aparatur sipil negara sesuai kebutuhan	100% (2 dokumen perencana aan dan 5 dokumen pengawa san)	100% (2 dokumen perencana an dan 5 dokumen pengawas an)
4	Momotivasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai dilingkup Setda Tanjab Barat	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan perlengkapan pegawai Setda dlm skala priorotas sesuai kemampuan	100% ,	100%

5	Terlaksananya pendataan dan pelaporan aset Setda Tanjab Barat secara tertib dan tepat waktu	keuangan daerah Terwujudnya pengelolaan aset/barang daerah secara tertib	100%	100%
1	BAGIAN SDA Menciptakan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu, terkoordinasi dan terkendali	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya fasilitas, koordinasi dan terpadu pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan - Terpenuhinya koordinasi, pemantauan dan pengendalian pengelolaan bidang kehutanan - Terpenuhinya koordinasi dan terpantaunya bidang pembangunan perikanan - Terpenuhinya fasilitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang ketahanan pangan - Terpenuhinya koordinasi dan terpantaunya pembangunan bidang sumber daya air - Tersusunnya buku sumber daya alam sebagai acuan pelestarian SDA - Terpenuhinya fasilitas, koordinasi, pemantauan dan pengendalian bidang pertambangan dan energi 	<ul style="list-style-type: none"> 13 Kecamatan 13 Kecamatan 13 Kecamatan 13 Kecamatan 13 Kecamatan 50 Buku 13 Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> 13 Kecamatan 13 Kecamatan 13 Kecamatan 13 Kecamatan 13 Kecamatan 50 Buku 13 Kecamatan

		- Terpenuhinya koordinasi dan terpantaunya pembangunan bidang lingkungan hidup	13 Kecamatan	13 Kecamatan
	BAGIAN UMUM			
1	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Kearsipan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Sekretariat Daerah dengan baik tertib dan lancar	Tertip pengelola administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
2	Terpeliharanya kebersihan rumah jabatan/ dinas	- Jumlah pemeliharaan rutin rumah jabatan/dinas untuk kepentingan dinas - Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan kinerja	3 Rumah Dinas	3 Rumah Dinas
3	Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis bagi Aparatur Sipil Negara	Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti Bimtek/ pelatihan singkat yang sesuai dengan tupoksi	8 Orang	8 Orang
	Memotivasi peningkatan Kapasitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara			
4	- Pelaporan pelaksanaan kegiatan dengan baik dan tepat waktu - Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SDPD	Jumlah laporan pelaksanaan capaian kinerja dan keuangan Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Buku	4 Buku
5	Kelancaran tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah	- Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga pemerintah non departemen / luar negeri - Jumlah kunjungan kerja / inspeksi ke daerah dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya	20 Kali 10 Kali	20 Kali 10 Kali

BAGIAN HUMAS PROTOKOL				
1	Peningkatan Kerjasama dan Layanan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Media Masa dan Peningkatan Optimalisasi dan Efektivitas Pemberitaan pimpinan	- Terwujudnya optimalisasi efektivitas pemberitaan Pembangunan serta layanan informasi publikasi dan Diseminasi informasi yang merata dan berimbang kepada Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan
		- Terwujudnya penghimpunan, Pengolahan dan layanan Dokumentasi dengan baik, valid, akurat dan dapat diakses sesuai kebutuhan.	12 Bulan	12 Bulan

B. Realisasi Anggaran Tahun 2018

Pada tahun Anggaran 2018, Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat menganggarkan sebesar Rp. 46.809.626.201,- Sedangkan setelah APBD-P menjadi Rp. 48.450.534.862,-. Dengan alokasi anggaran per Bagian sebagai berikut :

Tabel 4
Realisasi Anggaran Per-Bagian Setda Tanjab Barat Tahun 2018

NO	BAGIAN	APBD	SETELAH APBD-P	REALISASI	% KEU	% FISIK
1	HUKUM	1.129.612.300,-	1.129.612.300,-	1.128.541.100,-	99.91	99.88
2	HUMAS DAN PROTOKOL	3.072.650.050,-	3.700.120.050,-	3.693.993.250,-	99.83	100
3	EKONOMI	803.210.500,-	803.210.500,-	731.770.500,-	91.11	85.45
4	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3.822.442.000,-	2.753.992.000,-	2.173.834.500,-	78.93	89.13
5	SUMBER DAYA ALAM	740.852.540,-	740.852.540,-	655.542.500,-	88.48	88.88
6	ORGANISASI	1.010.379.000,-	1.010.379.000,-	914.532.000,-	90.51	100
7	KESRA DAN KEAGAMAAN	15.629.096.015,-	15.564.199.215,-	14.121.595.495,-	90.73	99.95
8	PEM OTDA	1.567.468.400,-	1.567.468.400,-	1.372.411.400,-	87.56	73
9	UMUM	11.123.878.980,-	11.992.586.441,-	10.072.363.779,-	83.99	100
10	SARANA DAN PRASARANA	7.910.036.416,-	9.188.114.416,-	7.695.407.146,-	83.75	100
JUMLAH		46.809.626.201,-	48.450.534.862,-	42.559.991.670,-	87.84	93.64

Sumber : Data Bag. ADP tahun 2018

Realisasi anggaran belanja langsung yang dikelola oleh seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir tahun 2018 sebesar Rp. 48.450.534.862,-. Untuk realisasi keuangan sebesar 87.84% sedangkan untuk realisasi fisik pada tahun 2018 sebesar 93.64 %.

Ditinjau dari seluruh bagian yang terlihat pada tabel diatas, pada tahun 2018 ini, Bagian Hukum menunjukkan serapan anggaran keuangan tertinggi yaitu sebesar 99,91 %. Sedangkan untuk bagian yang serapan anggaran keuangan terendah adalah bagian Administrasi Pembangunan, dengan persentase keuangan sebesar 78.93%.

Adapun capaian Fisik tertinggi yaitu sebesar 100 % dicapai oleh Bagian Humas dan Protokol, Bagian Organisasi, Bagian Umum dan Bagian Saprass. Sedangkan Capaian Fisik terendah yaitu 73 % dicapai oleh bagian Pemerintahan dan Otonomi daerah.

Maka dari itu diharapkan kedepannya seluruh bagian di Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat benar – benar berperan dalam meningkatkan capaian target dalam mengalokasikan anggaran sehingga diharapkan capaian target kinerja pada setiap bagian bisa mencapai 100 %.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Upaya perwujudan Visi dan Misi Sekretariat Daerah dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, membangun harmonisasi dan mengintegrasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi dan pelaporan sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung dan mendorong percepatan perwujudan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi Kabupaten yang Maju, Aman, Adil, dan Merata Berlandaskan Iman dan Taqwa.

Dokumen ini berupaya memaparkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2018, dengan seluruh hasil capaiannya baik yang masih berupa out put maupun out come dari program-kegiatan.

Faktor pendorong dalam capaian keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 adalah antara lain adalah ditetapkannya regulasi-regulasi pusat tentang tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga mendorong tumbuhnya komitmen untuk membangun dan melaksanakan AKIP tatanan SAKIP secara lebih komprehensif di seluruh sisi bidang penyelenggaraan pemerintahan. Semakin selarasnya berbagai kebijakan pusat dan lintas sektoral menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang perubahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu kebutuhan bukan sekadar kewajiban. Hal tersebut telah mendorong tingkat koordinasi yang semakin tinggi dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Daerah antara lain adalah :

1. Masih ada kebijakan dan regulasi pusat yang belum sinergis baik dalam penetapan maupun pengaturannya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam implementasinya di daerah.

2. Masih adanya kebijakan pusat yang tidak dapat di implementasikan karena terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi dan karakteristik potensi dan permasalahan pemerintahan daerah.
3. Masih belum terkoordinasinya perencanaan Bagian-Bagian pada lingkup Sekretariat Daerah secara maksimal, sehingga masih terdapat kecenderungan perencanaan yang bersifat mandiri, menyebabkan daya dorong terhadap tercapainya impact (dampak) dari program kegiatan Sekretariat Daerah belum maksimal.
4. Penetapan indikator-indikator kinerja yang belum seluruhnya terukur dengan indikator kinerja yang tepat, sehingga target kinerja tiap tahun cenderung statis dan tidak dapat menunjukkan/menggambarkan hasil kinerja sebenarnya.
5. Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan fasilitasi perumusan, perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan belum optimalnya peran, fungsi, dan kualitas kinerja Sekretariat Daerah sebagai core Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Langkah kedepan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkenaan dengan regulasi-regulasi pusat yang terdapat perbedaan-perbedaan dalam penetapan maupun pengaturannya.
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan seluruh OPD, untuk memaksimalkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan otonomi daerah, maupun dalam akselerasi implementasi regulasi dan ketentuan pusat sesuai dengan kondisi, karakteristik, potensi dan permasalahan daerah.

3. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja sekretariat daerah melalui koordinasi internal Sekretariat Daerah, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Sekretariat Daerah sebagai contoh dan tauladan bagi OPD.
4. Meningkatkan kualitas SDM Sekretariat Daerah melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang mencukupi tentang akuntabilitas capaian kinerja Sekretariat Daerah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2018.

Kuala Tungkal, Maret 2019



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Drs. H. AMBOK TUO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 009

